



BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI  
KEPANITERAAN

# MANAJEMEN PERUBAHAN

---

WBK | ZONA INTEGRITAS

Anggota:

1. **Ganggas Wibisono**
2. **Alifah Rahmawati**
3. **Achmad Dodi Haryadi**
4. **Agusniwan Etra**
5. **Suryo Gilang Romadlon**
6. **Muchtar Hadi Saputra**
7. **Samadhi Wisnu Broto**
8. **Restu Purwandari**
9. **Isyaiyas Andhito**

## DAFTAR ISI

1. Laporan Kegiatan Pembangunan Budaya Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
2. Undangan Sosialisasi Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Whistle Blowing System
3. Surat Undangan, Jadwal Kegiatan dan Dokumentasi Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
4. Surat Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Pembahasan Penguatan Sistem Pengendalian Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi
5. Surat Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembangunan ZI Menuju WBK Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2022
6. Capture Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sebagai pengejawantahan budaya kerja inovatif, profesional, cepat, aman, ramah lingkungan (paperless) dan efisien
7. Capture Manajemen Talenta
8. Capture Sidang Online
9. Capture Aplikasi Laporan Kesiapan Sidang
10. Pakta Integritas Pegawai Biro HAK
11. Penerapan Aplikasi e-Perisalah

---

# LAPORAN KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

## 2019



---

KERJA SAMA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN  
SATGAS SABER PUNGLI DAN KPK DAN KEMENPANRB DAN OMBUDSMAN



Inspektur  
Pawit Haryanto - NIP. 19640217 198503 1 002

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

*Digital Signature*  
*mk-1153878473200706031847*

## **A. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
10. Peraturan Menteri PAN-RB Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Menteri PAN-RB No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
12. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan;

## **B. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, berdasar pengertian umum Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan public.





### C. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman mengenai konsep integritas, budaya integritas, rambu-rambu integritas dan budaya yang berintegritas;
2. Terimplementasikannya budaya integritas dalam mendukung kinerja pelayanan;
3. Terbentuknya karakter pimpinan dan pegawai yang berbudaya integritas.

### D. Pelaksanaan Kegiatan

#### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan **Membangun Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi** dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : 13- 14 November 2019 (2 Hari)

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : Di Ruang Aula Lt.1 Gedung Mahkamah Konstitusi

#### b. Peserta

Peserta Kegiatan Sosialisai terdiri Narasumber dari Satgas Saber Pungli, KPK, KemenPAN-RB, Ombudsman RI dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi. Narasumber dari Satgas Saber Pungli adalah:

1. Prof. Dr. Muh. Mahfud MD, S.H., S.U. (Pengendali/ Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan)
2. Adi Warman, S.H., M.H., MBA (Staf Ahli Kemenko Polhukam)
3. Irjen Pol. Dr. Drs. Widiyanto, S.H., M.Si. (Sekretaris Satgas Saber Pungli)

Narasumber dari KPK adalah:

1. Timotius Hendrik Partohap (Direktorat Litbang Deputi Pencegahan)

Narasumber dari KemenPAN-RB adalah:

1. Emida Suparti, S.H., M.A.P. (Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik)

Narasumber dari Ombudsman RI adalah:

1. Awidya Mahadewi, S.S., M.A.P. (Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan)

### E. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Materi yang diberikan pada kegiatan sosialisasi tersebut adalah materi Peran Saber Pungli di Kementerian/Lembaga, Benturan Kepentingan & Gratifikasi, Kebijakan Pelayanan Pengaduan Masyarakat, dan Tata Kelola Pengaduan Masyarakat.



## F. Hasil/ Resume Sosialisasi

Pada Kegiatan ini pembukaan dilakukan oleh Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah selaku Sekretaris Jenderal MK dengan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan. Dilanjutkan dengan pemberian sambutan oleh YM. Ketua MK Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. .

Pada sesi penyampaian materi hari pertama, materi disampaikan oleh *Keynote Speaker* Prof. Dr. Muh. Mahfud MD, S.H., S.U. (Pengendali Satgas Saber Pungli/ MenkoPolhukam) dengan materi Peran Saber Pungli dalam Upaya Pembangunan Budaya Anti Korupsi. Selanjutnya materi diberikan oleh Irjen Pol. Dr. Drs. Widiyanto, S.H., M.Si. (Sekretaris Satgas Saber Pungli) dan Adi Warman, S.H., M.H., MBA (Staf Ahli Kemenko Polhukam) mengenai Pembentukan Satgas Saber Pungli di Kementrian/ Lembaga.

Sedangkan pada sesi penyampaian materi hari kedua, materi disampaikan oleh Timotius Hendrik Partohap (Direktorat Litbang Deputy Pencegahan) dengan materi Benturan Kepentingan dan Gratifikasi. Pada sesi materi selanjutnya peneri oleh Emida Suparti, S.H., M.A.P. (Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik) dengan materi Kebijakan Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan materi terakhir disampaikan oleh Awidya Mahadewi, S.S., M.A.P. (Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan) dengan materi Tata Kelola Pengaduan Masyarakat.

### 1. Peran Saber Pungli dalam Upaya Pembangunan Budaya Anti Korupsi

Pembentukan Satgas Saber Pungli dilatarbelakangi oleh banyaknya pungli yang terjadi di masyarakat. Hal ini sungguh memberikan dampak yang negatif pada keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara karena selain menjadikan pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu juga memberikan kerugian pada masyarakat secara langsung dari aspek ekonomi. Untuk mengatasi kondisi tersebut maka dibentuklah Satgas Saber Pungli melalui **Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli**. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera.

Secara definisi **Pungli** itu sendiri adalah **tindakan/kegiatan meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (Lembaga, Perusahaan, dan Sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim.**

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan/ancaman kekerasan,



untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya/sebagian adalah milik orang lain, supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”, Pasal 368 KUHP.

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain, secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa orang lain, untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran, melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun”, Pasal 423 KUHP. Sedangkan pengertian pungli berdasarkan Buku Panduan Satgas Saber Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya, dikenakan atau dipungut di lokasi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang, kepada pihak lain, dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan, atau perbuatan pidana.

Dampak pungli dari berbagai sudut pandang:

- i. Ideologi: pungli merusak sisi ideologi bangsa Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sila ke 2, 3 dan 5.
- ii. Politik: pungli berdampak pada rusaknya wibawa pemerintah dan juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- iii. Ekonomi: pungli menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi
- iv. Sosial & budaya: ketika pungli terjadi maka budaya negative akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat
- v. Pertahanan & Keamanan: pungli yang terjadi dapat menimbulkan kersahan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), dijelaskan susunan organisasinya sebagai berikut:

Pengandali/ Penanggungjawab : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Jenderal Kementerian Dalam negeri

Wakil Ketua Pelaksana : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

II

Sekretaris : Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang



politik, Hukum dan Keamanan

- Anggota terdiri dari : unsur
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  2. Kejaksaan Agung
  3. Kementerian Dalam Negeri
  4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  6. Ombudsman Republik Indonesia
  7. Badan Intelijen Negara
  8. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia

Satgas Saber Pungli berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 2, memiliki tugas **melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptmalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/ Lembaga maupun pemerintah daerah.** Satuan kerja yang dimaksud ialah **APIP** dan **APH** pada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

## 2. Benturan Kepentingan & Gratifikasi

Definisi konflik kepentingan:

“**Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi** untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam **penggunaan Wewenang** sehingga **dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya**”, Undang-Undang No.30 Tahun 2014

“**Situasi** dimana **Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi** terhadap setiap **penggunaan wewenang** sehingga **dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya**”, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2016

Risiko konflik kepentingan:

- i. Konflik kepentingan merupakan situasi yang dapat terjadi/timbul secara alamiah atau disengaja.
- ii. Muncul secara alami akibat multiperan yang dimainkan oleh seseorang atau situasi di luar kendali Anda.



iii. Resiko masuk dalam situasi konflik kepentingan dapat dialami siapa saja, termasuk Anda.

Sumber konflik kepentingan:

- i. Hubungan afiliasi
- ii. Gratifikasi
- iii. Kepemilikan asset
- iv. Rangkap jabatan dan moonlighting
- v. Kelemahan sistem organisasi
- vi. Kepentingan pribadi

Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan yudikatif dan aparat penegak hukum antara lain:

- i. Situasi yang dapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan pengadilan;
- ii. Situasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan yang dipengaruhi pihak lain;
- iii. Proses pengangkatan/mutase/promosi yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh pihak lain;
- iv. Rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu organisasi atau membuka jasa profesi lainnya.

Tahapan penanganan konflik kepentingan:

- i. Penyusunan kerangka kebijakan
- ii. Identifikasi situasi konflik kepentingan
- iii. Penyusunan strategi dan serangkaian tindakan penanganan konflik kepentingan
- iv. Implementasi kebijakan konflik kepentingan
- v. Memonitor implementasi kebijakan penanganan konflik kepentingan

### **3. Kebijakan Pelayanan Pengaduan Masyarakat**

Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional:

- i. Masyarakat

Pengaduan disampaikan melalui:

- tatap muka
- call-center



- surat atau email
  - SMS
  - Media social
  - Website
  - Aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
- ii. Admin Nasional
- Admin Nasional melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja
  - Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung
  - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di tingkat nasional
- iii. Admin Instansi/ Organisasi
- Admin Instansi/ Organisasi melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 hari kerja
  - Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung
  - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di tingkat Instansi/ Organisasi
- iv. Pejabat Penghubung
- Pejabat penghubung di setiap Penyelenggara memberikan telaah verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan
  - Menginput pengaduan yang diterima secara langsung

#### 4. Tata Kelola Pengaduan Masyarakat

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan **mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik** baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang **sebagian atau seluruh dananya bersumber dari**





**anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.**

Sarana:

- Ruang Pengaduan
- E-mail dan Online
- Call Centre 137, Telepon, SMS, Whatsapp
- Penerimaan surat
- Form Pengaduan

Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi:

- Sistem Informasi Penyelesaian Laporan (SIMPel v 1.0 dan 2.1)
- Memantau dan evaluasi pengelolaan laporan/pengaduan
- Menyusun dan melaporkan pengelolaan laporan/ pengaduan kepada Presiden dan DPR secara berkala

**G. Penutup**

Demikian laporan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan.

Mengetahui,  
Inspektur Mahkamah Konstitusi

Pawit Haryanto, S.H., M.M.  
NIP. 19640217 198503 1 002



## Lampiran Dokumentasi











**Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di  
Mahkamah Konstitusi Tahun 2019**









# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 421/PW.01/06/2021 22 Juni 2021  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Sosialisasi Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan WBS  
Area RB : **Pembangunan Zona Integritas**

Kepada Yth.

1. Kepala Biro Humas dan Protokol;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
4. Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas.

di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, khususnya persiapan pengajuan predikat WBK/WBBM bagi unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami mengundang Bapak/Ibu beserta seluruh pegawai di masing – masing unit kerjanya untuk hadir dalam Sosialisasi Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Whistleblowing System, yang akan dilaksanakan secara virtual pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Dikantor /kediaman masing – masing

Untuk *Link* dan *password* meeting akan kami informasikan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur  
Budi Achmad Djohari

Tembusan :

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal MKRI.



Inspektur  
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002  
*Digital Signature*  
[mk-154239257210622114946](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor: 465/PW.01/04/2022  
Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Undangan kegiatan Diseminasi

08 April 2022

**Kepada Yth.**  
**Seluruh Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal**  
**Mahkamah Konstitusi.**  
**Di**  
**Tempat.**

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami akan menyelenggarakan diseminasi dengan tema **“Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan diatas yang akan diselenggarakan secara *virtual* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022  
Waktu : Pukul 09.00 - 12.00 WIB  
Tema : Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan  
Pengaduan Masyarakat

*Link meeting zoom* : 96507283998 dan *passcode* 971824

Demikian kami sampaikan, atas perkenan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Inspektur,  
**Budi Achmad Djohari**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1988966167220408011201

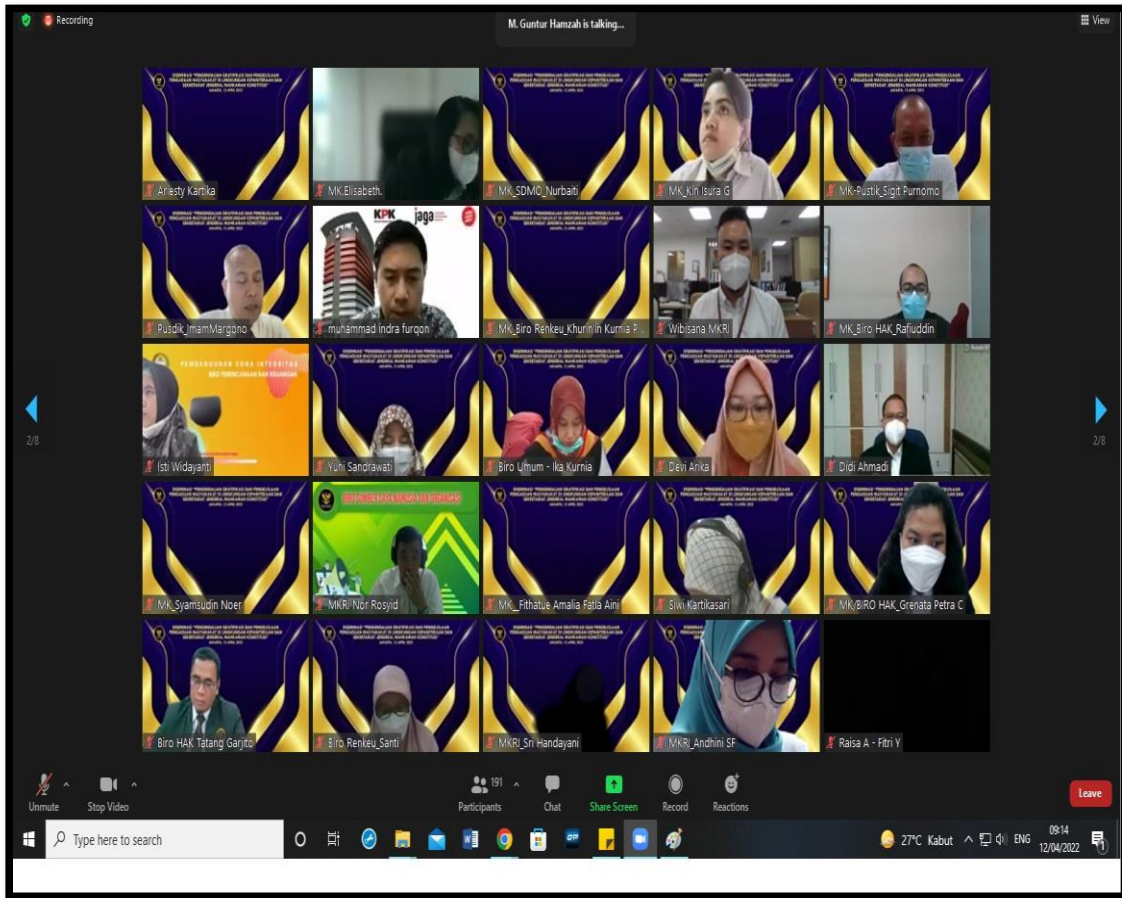
**JADWAL KEGIATAN**  
**Diseminasi Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat**  
**di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**  
**Tanggal 12 April 2022**

<b>Waktu</b>	<b>Uraian kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
09.00-09.30	Sambutan dan Pembukaan	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
09.30-10.30	Paparan dari Kementerian PAN & RB : – Pengelolaan Pengaduan masyarakat (Benturan Kepentingan, WBS, SP4N LAPOR!)	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10.30-11.30	Paparan dari KPK : – Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi
11.30-12.00	Diskusi	





# Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEDANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor: 483/PW.01/04/2022

14 April 2022

Lamp. :-

Perihal : Undangan *Focus Group Discussion*

**Kepada Yth.**  
**Daftar undangan terlampir**  
**Di**  
**Jakarta.**

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema **Penguatan Sistem Pengendalian Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi bagi Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin , 18 April 2022  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai  
Agenda : Pembahasan Penguatan Sistem Pengendalian Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi  
Tempat : Ruang Rapat lantai 11, Gd Mahkamah Konstitusi  
Pimpinan Rapat : Sekretaris Jenderal MKRI

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

**Inspektur,**  
**Budi Achmad Djohari**

Tembusan Yth ;  
1. Sekretaris Jenderal MKRI;  
2. Panitera MKRI.



Inspektur  
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002  
*Digital Signature*  
[mk1634192235220414080759](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



Daftar Undangan :

1. M. Guntur Hamzah
2. Muhidin
3. Edy Triyono B
4. Ida Ria Tambunan
5. Wiryanto
6. Budi Achmad Djohari
7. Tatang Garjito
8. Heru Setiawan
9. Teguh Wahyudi
10. Kurniasih Panti Rahayu
11. Elisabeth
12. Imam Margono
13. Sigit Purnomo
14. Ina Zuchriyah
15. Mundiri
16. Johan Yustisianto
17. Endrizal
18. Isti Widayati
19. Nor Rosyid Ardhani
20. Fajar Laksono
21. Sri Handayani
22. Budi Wijayanto
23. Nanang Subekti
24. Yuni Sandrawati
25. Mantiri John Dwi Arya
26. Ardly Nuradi
27. Saiful Anwar
28. Rizki Amalia
29. Andi Hakim
30. Arshinta Fitri Diyani
31. Dhita Chantika M
32. Dian Dwi Hapsoro
33. Fadel Fahrul Rozi



**Data Dukung 14**

## Informasi Rapat

Setiap peserta dapat memeriksa dan melaporkan ke pembuat rapat jika ingin ada perubahan..

Judul	: Focus Group discussion Penguatan Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Pembuat Rapat	: Arshinta Fitriyani
Pengundang	: Inspektorat
Waktu Mulai	: 2022-04-18 09:00:00
Waktu Selesai	: 2022-04-18 12:00:00
Lokasi	: R. Lantai 11 Ruang Rapat Lama (Gd 1)
Link SIKD	: <a href="https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&amp;id=43.130422084025">https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&amp;id=43.130422084025</a> ( <a href="https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&amp;id=43.130422084025">https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&amp;id=43.130422084025</a> )
Link absen	: <a href="https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=2C594BB5BA5BB0164E134AACACFB0B81">https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=2C594BB5BA5BB0164E134AACACFB0B81</a> ( <a href="https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=2C594BB5BA5BB0164E134AACACFB0B81">https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=2C594BB5BA5BB0164E134AACACFB0B81</a> ) <b>Perhatian</b> Dinyatakan hadir jika peserta absen 30 menit sebelum rapat dan setelah jam rapat selesai. Harap pembuat rapat menyesuaikan dan memperhatikan jam selesai rapat.
Link Notulensi Rapat	: <b>Notulensi belum di Upload ()</b>
Link Zoom	: ()
Keterangan	:

## Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan	Institusi
1	M. Guntur Hamzah Hadir : 09:35	Sekretaris Jenderal	MKRI
2	Muhidin Hadir : 10:43	Panitera	MKRI
3	Budi Achmad Djohari	Inspektur	MKRI
4	Tatang Garijo Hadir : 09:07	Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	MKRI
5	Tatang Garijo Hadir : 09:07	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	MKRI
6	Elisabeth Hadir : 08:32	Kepala Biro Umum	MKRI
7	Sigit Purnomo Hadir : 08:51	Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	MKRI
8	Imam Margo Hadir : 08:38	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
9	Heru Setiawan Hadir : 09:13	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	MKRI
10	Kurniasih Panti Rahayu Hadir : 09:13	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	MKRI
11	Teguh Wahyudi Hadir : 08:36	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	MKRI
12	Triyono Edy Budhiarto Hadir : 08:52	Panitera Muda I	MKRI
13	Wiryanto Hadir : 08:44	Panitera Muda II	MKRI
14	Ida Ria Tambunan Hadir : 08:51	Panitera Muda III	MKRI
15	Saiful Anwar	PP Tingkat I (Saiful Anwar)	MKRI
16	Rizki Amalia	PP Tingkat I (Rizki Amalia)	MKRI
17	Andi Hakim Hadir : 08:33	Plt. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	MKRI
18	Ardli Nuryadi Hadir : 08:56	Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi	MKRI
19	Arshinta Fitriyani Hadir : 09:35	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	MKRI
20	Dhita Cantika Megatania Hadir : 08:43	Auditor Muda (Dhita Cantika Megatania)	MKRI
21	Dian Dwi Hapsoro	Auditor Muda (Dian Dwi Hapsoro)	MKRI
22	M. Fadhel Fahrul Rozi Hadir : 11:14	Auditor Pertama (M. Fadhel Fahrul Rozi)	MKRI
23	Dwi Poesvitasari	Auditor Pertama (Dwi Poesvitasari)	MKRI
24	Mantiri John Dwi Arya Hadir : 08:36	Kepala Bagian Pengamanan Dalam	MKRI
25	Nor Rosyid Ardani Hadir : 08:30	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
26	Johan Yustisianto Hadir : <del>09:03</del>	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	MKRI
27	Ina Zuchriyah Hadir : <del>08:47</del>	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	MKRI
28	Budi Wijayanto Hadir : <del>09:58</del>	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	MKRI
29	Isti Widayanti	Kepala Bagian Keuangan	MKRI
30	Sri Handayani Hadir : <del>08:39</del>	Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri	MKRI
31	Imam Margono Hadir : <del>08:38</del>	Kepala Bagian Umum	MKRI
32	Mundiri Hadir : <del>08:38</del>	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN	MKRI
33	Fajar Laksono	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalama Negeri	MKRI
34	Endrizal	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	MKRI
35	Sigit Purnomo Hadir : <del>08:51</del>	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data	MKRI
36	Nanang Subekti Hadir : <del>08:52</del>	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	MKRI
37	Yuni Sandrawati Hadir : <del>09:25</del>	Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara	MKRI
Jumlah Peserta : 37   Jumlah hadir : 29			

**Dokumentasi Kegiatan FGD Penguatan Sistem Pengendalian  
Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022**













# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

**RB : Manajemen Perubahan**

Nomor : 575/OT.03/05/2022  
Lampiran : 2 (satu) lembar  
Hal : Undangan Sosialisasi ZI dan WBK Biro HAK

Jakarta, 19 Mei 2022

Yth. **(Daftar Peserta Terlampir)**  
di Jakarta

Dengan hormat, menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Unit Kerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Mei 2022  
Pukul : 14.00 WIB sd selesai / 15.00 WITA s.d. selesai  
Tempat : Aplikasi Zoom Meeting:  
(<https://zoom.us/j/99914371715?pwd=RzljUkNCaDBURVI3cVloWEQycS9Udz09>)  
Meeting ID: 999 1437 1715  
Passcode: 210886  
Agenda : Sosialisasi Biro HAK membangun kawasan Zona Integritas dan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi kepada pegawai dan masyarakat di lingkungan Biro HAK.

Untuk kelancaran jalannya rapat, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i tepat waktu. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Administrasi  
Kepaniteraan,  
**Tatang Garjito**

Tembusan Yth.

1. Kepala Biro Umum;
2. Kepala Biro SDM dan Organisasi.



Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan  
Tatang Garjito - NIP. 19670513 198802 1 001  
*Digital Signature*  
*mk514553836220519115202*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Lampiran 1 Surat 575/OT.03/05/2022  
Tanggal 19 Mei 2022

Daftar Peserta Sosialisasi:

Pegawai Biro HAK

1. Tatang Garjito
2. Ina Zuchriyah
3. Johan Yustisianto
4. Yohana Citra Permatasari
5. Rafiuddin
6. Dewi Hastuti
7. Rahmadiani Putri Nilasari
8. Paulus Rudy Calvin Sinaga
9. Muhammad Ramlan Aminuddin
10. Grenata Petra Claudia
11. Muhamad Doni Ramdani
12. Aditya Yuniarti
13. Puguh Apriyanto
14. Lia Nur Jannah
15. Arinta Sulistiyo Eko P.
16. Mohammad Chamid Zuhri
17. Andhyta Andam Nadia
18. Juliana Tikka Murni
19. Nuzul Qur'aini Mardiyah
20. Syamsudin Noer
21. Rita
22. Supriyanto
23. Siska Yosephin Sirait
24. Achmad Dodi Haryadi
25. Ditya Zuliana
26. Aqmarina Rasika
27. Alifah Rahmawati
28. Hermita Uly Artha Sinurat
29. Khairuddin
30. Siswantana Putri Rachmatika
31. Indah Karmadaniah
32. Haifa Arief Lubis
33. Riani Anggraini
34. Suryo Gilang Romadlon
35. Rosalia Agustin Shella Hendrasmara
36. Rika Dewi Andryani
37. Amriansyah Maulana
38. Hersinta Setiarini
39. Agusniwan Etra
40. Muchtar Hadi Saputra
41. Yunita Nurwulantari
42. Rio Tri Juli Putranto
43. Fenny Tri Purnamasari
44. Dellaafirayama
45. Nies Lindy Happyana
46. Samadhi Wisnu Broto
47. Arum Wulandari
48. Andi Nur Shafa Marwa
49. Isyaiyas Andhito
50. Kanya Suhita
51. Nurrahman Yakub
52. Octarina Valettrin
53. Rama Juniadi
54. Restu Purwandari
55. Shofyan Shobakhi
56. Samira Adriana
57. Pramana Aldyan
58. Rahmat Basuki
59. Rezky Widiyanto



Lampiran 2 Surat 575/OT.03/05/2022  
Tanggal 19 Mei 2022

Pegawai Mancadaya

1. Gutomo
2. Slamet Riyadi
3. Hendro P
4. Soni A.
5. Andoko
6. Agnes A.
7. Rio Rizki A.
8. N. Juwita
9. Imran C.
10. Alfiansyah
11. Suray
12. Sunarko
13. Dadang
14. Taufikurrohman
15. Danang YP
16. Didik S.
17. Rizal
18. Panuju
19. Sarwono
20. Nella O
21. Bambang W.
22. Suroso
23. Atok Septianto
24. Rudi Kurniawan
25. Wahyudin
26. Rusli
27. Satiri
28. Muntoha
29. Meidah Fitri
30. Heru Hermawan
31. Johan Hasmuni
32. Swanti Tambunan
33. Fitri Yulianto
34. Fitri Widyawati
35. Nita Marlina Sari
36. Pricillia Carolina
37. Riana Andam Dewi
38. Rohimah Novia Ulfah
39. Desi Ernawati
40. Prio Gunawan
41. Jumadi
42. Kurnia Annisa
43. Puji Astuti
44. Suratno
45. Topan Candra





## Informasi Rapat

Setiap peserta dapat memeriksa dan melaporkan ke pembuat rapat jika ingin ada perubahan..

- Judul : Sosialisasi ZI dan WBK untuk Pegawai di Lingkungan Biro HAK
- Pembuat Rapat : Yohana Citra Permatasari
- Pengundang : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Waktu Mulai : 2022-05-20 14:00:00
- Waktu Selesai : 2022-05-20 15:30:00
- Lokasi : kediaman masing-masing (zoom meeting)
- Link SIKD : [https://sikd.mkri.id/FilesUploaded\\_sd\\_ttd/58-out-220519111528/58\\_220519115202\\_TTD.pdf](https://sikd.mkri.id/FilesUploaded_sd_ttd/58-out-220519111528/58_220519115202_TTD.pdf)  
([https://sikd.mkri.id/FilesUploaded\\_sd\\_ttd/58-out-220519111528/58\\_220519115202\\_TTD.pdf](https://sikd.mkri.id/FilesUploaded_sd_ttd/58-out-220519111528/58_220519115202_TTD.pdf))  
<https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=C44D3C85460F9C5E5D9A0CDB952DF927>
- Link absen : (<https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=C44D3C85460F9C5E5D9A0CDB952DF927>)  
**Perhatian** Dinyatakan hadir jika peserta absen 30 menit sebelum rapat dan setelah jam rapat selesai. Harap pembuat rapat menyesuaikan dan memperhatikan jam selesai rapat.
- Link Notulensi Rapat : **Notulensi belum di Upload ()**  
<https://zoom.us/j/99914371715?pwd=RzljUkNCaDBURVI3cVlo>
- Link Zoom : [WEQycS9Udz09](https://zoom.us/j/99914371715?pwd=RzljUkNCaDBURVI3cVlo) (<https://zoom.us/j/99914371715?pwd=RzljUkNCaDBURVI3cVlo> WEQycS9Udz09)
- Keterangan : Meeting ID: 999 1437 1715 Passcode: 210886

## Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan	Institusi
1	Tatang Garjito Hadir : 13:38	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	MKRI
2	Johan Yustisianto Hadir : 13:32	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
3	Ina Zuchriyah Hadir : 13:42	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	MKRI
4	Supriyanto Hadir : 14:02	Pengelola Persidangan	MKRI
5	Rita Hadir : 13:52	Pengadministrasi Registrasi Perkara (Rita)	MKRI
6	Nuzul Quraini Mardiya Hadir : 14:02	Pengadministrasi Registrasi Perkara (Nuzul Qurani)	MKRI
7	Rafiuddin	Kepala Subbagian Hukum	MKRI
8	Dewi Hastuti Hadir : 13:37	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan	MKRI
9	Yohana Citra Permatasari Hadir : 13:37	Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan	MKRI
10	Rahmadiani Putri Nilasari Hadir : 14:07	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Rahmadiani Putri Nilasari)	MKRI
11	Lia Nur Jannah Hadir : 14:02	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Lia Nur Jannah)	MKRI
12	Arinta Sulistiyo Hadir : 13:54	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Arinta Sulistiyo Eko P.)	MKRI
13	Juliana Tikka Murni Hadir : 13:52	Analisis Tata Usaha	MKRI
14	Paulus Rudy Calvin Sinaga Hadir : 14:06	Analisis Hukum (Paulus Rudy Calvin Sinaga)	MKRI
15	Mohammad Chamid Zuhri Hadir : 14:35	Analisis Tata Usaha (Mohammad Chamid Zuhri)	MKRI
16	Dellafirayama Hadir : 13:31	Tenaga Editor Madya (Della Firayama)	MKRI

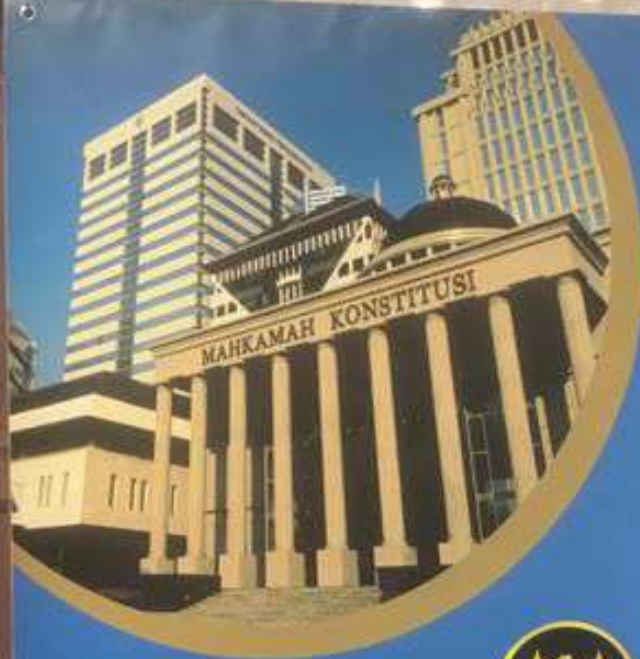
No	Nama	Jabatan	Institusi
17	Samadhi Wisnu Broto Hadir : 13:31	Tenaga Editor Madya (Samadhi Wisnu Broto)	MKRI
18	Arum Wulandari Hadir : 13:31	Tenaga Editor Madya (Arum Wulandari)	MKRI
19	Nies Lindy Happyana Hadir : 13:38	Tenaga Editor Madya (Nies Lindy Happyana)	MKRI
20	Rama Juniadi Hadir : 13:30	Tenaga Transkriptor Madya (Rama Juniadi)	MKRI
21	Pramana Aldyan Hadir : 13:32	Tenaga Transkriptor Pertama (Pramana Aldian Firzal)	MKRI
22	Shofyan Shobakhi Hadir : 13:30	Tenaga Transkriptor Pertama (Shofyan Shobakhi)	MKRI
23	Octarina Vallettrin Hadir : 13:30	Tenaga Transkriptor Madya (Octarina Vallettrin)	MKRI
24	Andi Nur Shafa Marwa Hadir : 13:33	Tenaga Transkriptor Madya (Andi Nur Shafa Marwa)	MKRI
25	Restu Purwandari Hadir : 13:31	Tenaga Transkriptor Madya (Restu Purwandari)	MKRI
26	Isyaiyas Andhito Hadir : 13:41	Tenaga Transkriptor Madya (Isyaiyas Andhito)	MKRI
27	Rezky Widianto Hadir : 13:30	Tenaga Perekam Madya (Rezky Widiyanto)	MKRI
28	Rahmat Basuki Hadir : 13:43	Tenaga Perekam Madya (Rahmat Basuki)	MKRI
29	Hermita Uly Artha Sinurat	Pengolah Data Perkara dan Putusan-2 (Hermita Uly Artha Sinurat)	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
30	Khairuddin Hadir : 13:34	Pengolah Data Perkara dan Putusan (Khairuddin)	MKRI
31	Siswantana Putri Rachmatika Hadir : 14:06	Pengolah Data Perkara dan Putusan-1 (Siswantana Putri Rachmatika)	MKRI
32	Indah Karmadaniah Hadir : 14:02	Pengolah Data Perkara dan Putusan (Indah Karmadaniah)	MKRI
33	Muhamad Doni Ramdani Hadir : 14:05	Pengolah Data Perkara dan Putusan (Muhamad Doni Ramdani)	MKRI
34	Siska Yosephin Sirait Hadir : 14:01	Pengelola Persidangan (Siska Yosephin Sirait)	MKRI
35	Aqmarina Rasika Hadir : 15:19	Pengelola Persidangan (Aqmarina Rasika)	MKRI
36	Alifah Rahmawati Hadir : 13:58	Pengelola Persidangan (Alifah Rahmawati)	MKRI
37	Ditya Zuliana Hadir : 14:01	Pengelola Persidangan (Ditya Zuliana)	MKRI
38	Achmad Dodi Haryadi Hadir : 14:00	Pengelola Persidangan (Achmad Dodi Haryadi)	MKRI
39	Rio Tri Juli Putranto Hadir : 14:01	Juru Panggil (Rio Tri Juli Putranto)	MKRI
40	Fenny Tri Purnamasari Hadir : 14:33	Juru Panggil (Fenny Tri Purnamasari)	MKRI
41	Andhyta Andam Nadia Hadir : 14:12	Pengadministrasi Registrasi Perkara pada Panitera (Andhyta Andam Nadia)	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
42	Muhammad Ramlan Aminuddin <b>Hadir : 13:49</b>	Analisis Hukum pada Panitera (Muhammad Ramlan Aminuddin)	MKRI
43	Aditya Yuniarti <b>Hadir : 13:59</b>	Analisis Hukum (Aditya Yuniarti)	MKRI
44	Grenata Petra Claudia <b>Hadir : 13:36</b>	Analisis Hukum (Grenata Petra Claudia)	MKRI
45	Hersinta Setiarini	Pengolah Data Perkara dan Putusan	MKRI
46	Yunita Nurwulantari <b>Hadir : 13:44</b>	Pengolah Data Perkara dan Putusan	MKRI
47	Agusniwan Etra	Pengolah Data Perkara dan Putusan pada Hakim Konstitusi YM. Suhartoyo	MKRI
48	Suryo Gilang Romadlon	Pengolah Data Perkara dan Putusan pada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi YM. Aswanto	MKRI
49	Muchtar Hadi Saputra	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi YM. Saldi Isra	MKRI
50	Ganggas Wibisono <b>Hadir : 13:50</b>	Pengolah data Perkara dan putusan	MKRI
51	Riani Anggraini	Pengolah Data Perkara dan Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi	MKRI
52	Rika Dewi Andryani <b>Hadir : 14:14</b>	Pengolah Data Perkara dan Putusan	MKRI
53	Rosalia Agustin Shella	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Arief Hidayat (Rosalia Agustin Shella)	MKRI
54	Syamsudin Noer <b>Hadir : 13:38</b>	Pengadministrasian Registrasi Perkara (Syamsudin Noer)	MKRI
55	Amriansyah Maulana	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams (Amriansyah Maulana)	MKRI



No	Nama	Jabatan	Institusi
			Jumlah Peserta : <b>55</b>   Jumlah hadir : <b>46</b>



**BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI  
KEPANTERAAN**

**MEMBANGUN KAWASAN  
ZONA INTEGRITAS  
WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI**

***BIRO HAK PROGRESIF***

**PROFESIONAL - BERINTEGRITAS  
EFISIEN - INOVATIF**









# Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

**Biro Hukum dan Administrasi  
Kepaniteraan**

Jakarta, 20 Mei 2022

- Syamsudin Noer
- Yohana Citra
- Tatang Garjito
- Rezky Widianto
- Vallettrin
- Restu Purwandari
- Dewi Hastuti

# SLOGAN BIRO HAK MENUJU ZI DAN WBK



## BIRO HAK

# PROGRESIF

PROFESIONAL - BERINTEGRITAS - EFISIEN - INOVATIF

SDM yang **PROFESIONAL** dalam bekerja

SDM **BERINTEGRITAS** memegang nilai kejujuran

Pemilihan cara kerja yang **EFISIEN** dalam mencapai tujuan

Berpikir **INOVATIF** dalam peningkatan layanan

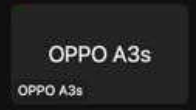




## TUJUAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



- WBK /WBBM perwujudan **Clean Government dan Good Governance**
- Komitmen membangun **Budaya Anti Korupsi**
- Ikhtiar mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi menuju lembaga Peradilan yang **modern** dan **terpercaya**
- Upaya meningkatkan **kepercayaan publik** (*public trust*)



## ENAM AREA PERUBAHAN



- 1 • Manajemen Perubahan
- 2 • Penataan Tata Laksana
- 3 • Sistem Manajemen SDM
- 4 • Penguatan Akuntabilitas
- 5 • Penguatan Pengawasan
- 6 • Penguatan Kualitas Layanan Publik

Nia

Nia



Nita Marlina Sari

Puji astuti

Puji astuti

Alfiansah

Alfiansah

Pramana Firzal

Pramana Firzal

7\_alifah\_mk

7\_alifah\_mk

Dodi\_Biro H...

Dodi\_Biro HAK

 <p>Ganggas Wibisono</p>	 <p>Yohana Citra</p>	 <p>Johan Yustisianto</p>	 <p>Meidah Fitri</p>	 <p>Isyalyas Andhito</p>
 <p>Tatang Garjito</p>	 <p>Nella oktaviani</p>	 <p>Syamsudin Noer</p>	 <p>Rezky Widianto</p>	 <p>Vallettrin</p>
 <p>Restu Purwandari</p>	 <p>Dewi Hastuti</p>	 <p>Samadhi Wisnu Broto</p>	 <p>Nies Lindy</p>	 <p>Shofyan</p>
 <p>Della</p>	 <p>Fitri yulianto</p>	 <p>Rafiuddin</p>	 <p>Andi Nurshafa Marwa</p>	 <p>Ina Zuchriyah Tjando</p>
 <p>Ato Septianto</p>	 <p>Gutomo</p>	 <p>Grenata Petra C</p>	 <p>Paulus Rudy Calvin S</p>	 <p>Lia Nur Jannah</p>

1/4

1/4

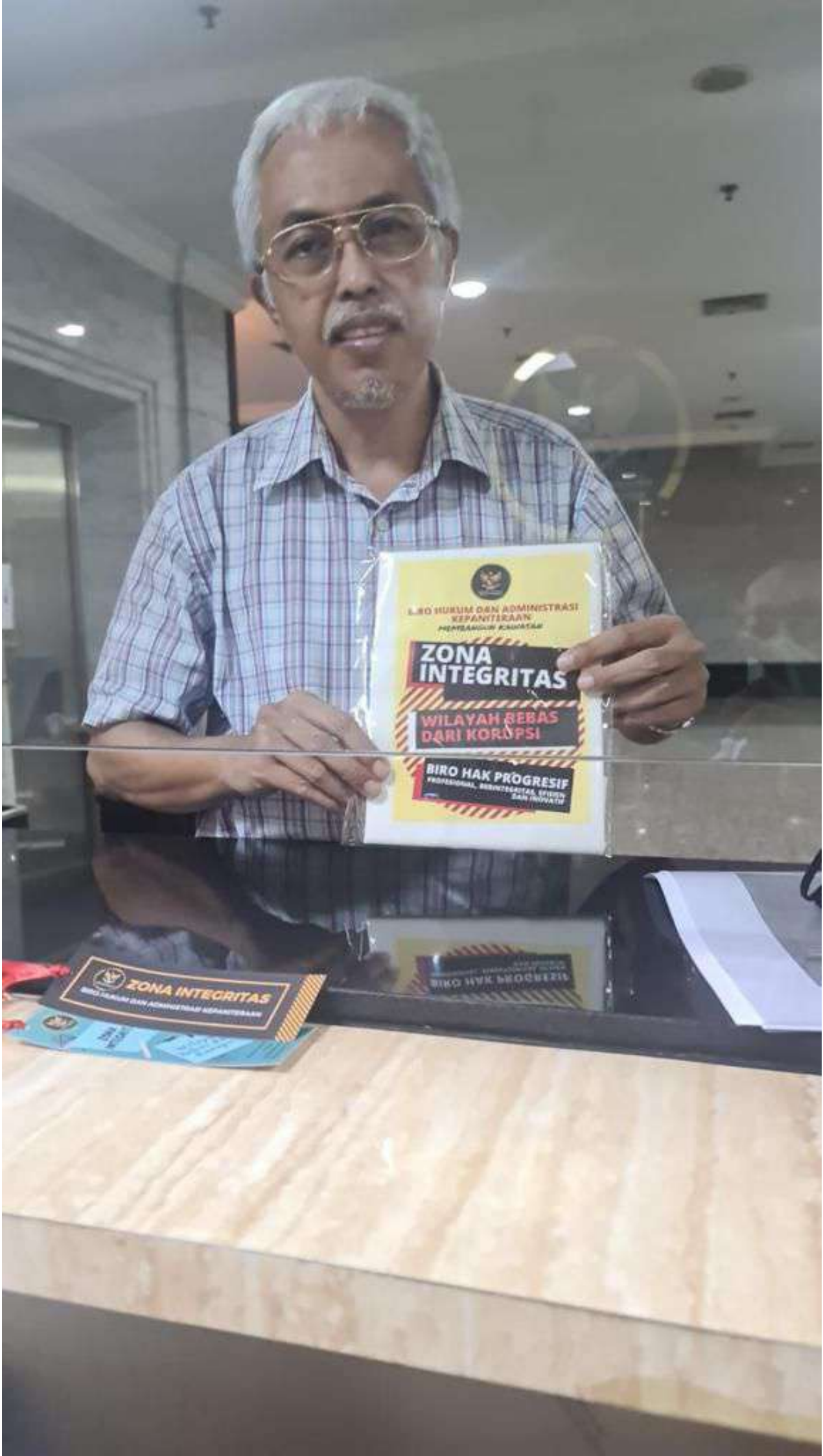


Recording

 <p>Grenata Petra C</p>	 <p>Paulus Rudy Calvin S</p>	 <p>MKRI_Tiyo</p>	 <p>Aditya Yuniarti_MK</p>	 <p>MKRI_Indah K</p>
 <p>Muhamad Doni Ramdani_Biro HAK</p>	 <p>Siska Y Sirait</p>	 <p>Rusly</p>	 <p>Imran Cahyadi</p>	 <p>Arum</p>
 <p>Redmi</p>	 <p>Jumiadi</p>	 <p>Rahmat Basuki</p>	 <p>Agnes aryanata</p>	 <p>bambang wisaptono</p>
 <p>sunarko pamdal</p>	 <p>Panuju</p>	 <p>Ahmad Satiri</p>	 <p>Lia Nur Jannah</p>	 <p>Galaxy J2 Prime</p>
 <p>Juliana Tikka Murni</p>	 <p>Didik supriyanto</p>	 <p>Galaxy J2 Prime</p>	 <p>Rita_MK</p>	 <p>Muntaha</p>

2/4

2/4



L.R.O HUKUM DAN ADMINISTRASI  
KEPANTERAAN  
MENTANGLIN KUNYATAK

# ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI

BIRO HAK PROGRESIF  
PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, BERHONORARI DAN INOVATIF

ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI













Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

# KEGIATAN SOSIALISASI MENUJU ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

JAKARTA, 20 MEI 2022



**BIRO HAK PROGRESIF**

PROFESIONAL - BERINTEGRITAS - EFISIEN - INOVATIF



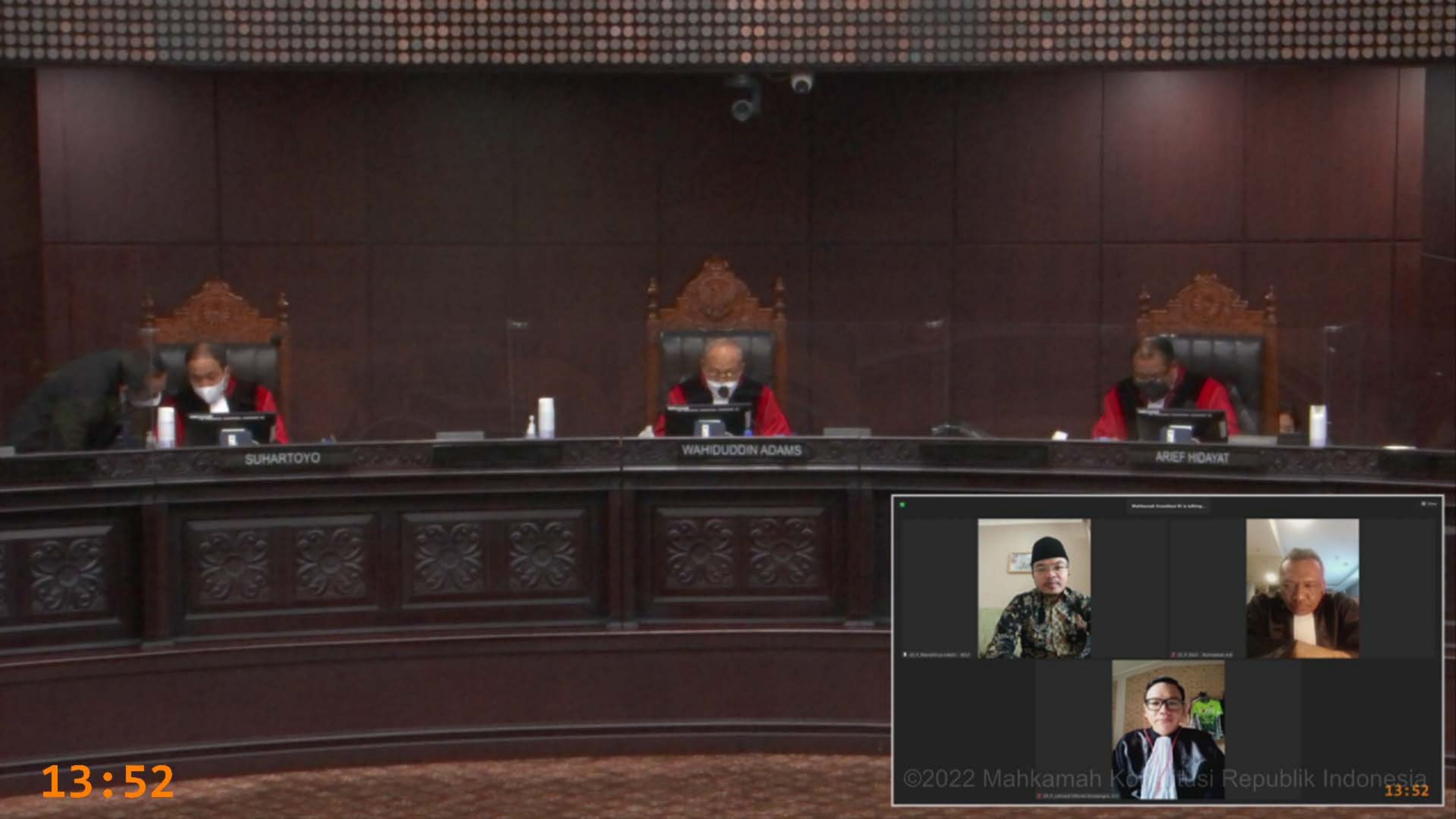
No	Unit Kerja	Response Time	Status
1	Biro Umum	0 Hari 4 Jam 45 Menit	Naik +5 ↑
2	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	0 Hari 5 Jam 52 Menit	Naik +5 ↑
3	Inspektorat	0 Hari 6 Jam 11 Menit	Turun -2 ↓
4	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 Hari 7 Jam 9 Menit	Turun -1 ↓
5	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	0 Hari 7 Jam 23 Menit	
6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0 Hari 9 Jam 7 Menit	Naik +3 ↑
7	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan P...	0 Hari 10 Jam 1 Menit	Naik +1 ↑
8	Biro Perencanaan dan Keuangan	0 Hari 10 Jam 50 Menit	Turun -4 ↓
9	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	0 Hari 11 Jam 9 Menit	Turun -7 ↓
10	Kepaniteraan	0 Hari 11 Jam 32 Menit	





13:50





SUHARTOYO

WAHIDUDDIN ADAMS

ARIEF HIDAYAT

©2022 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

13:52

13:52





29\_P\_Marselinus Edwin - BSLF



29\_P\_BSLF - Kurniawan Adi



29\_P\_Lefrand Othniel Kindangen, S.H.

13:52



### E-Checklist

Republik Indonesia



**Persiapan Sidang**



**Pelaporan Sidang**



### Laporan Persiapan Sidang

Untuk mengisi laporan silakan klik tombol berikut!

[isi Laporan](#)

#### Laporan Persiapan Sidang - Senin, 20 Juni 2022

No.	Tanggal & Waktu	Nomor Perkara	Ruangan	Status Pengisian
1.	Senin, 20 Juni 2022 11:00:00 WIB <b>Formulasi sudah diisi</b>	+ 90/PUU-XX/2022 + 96/PUU-XX/2022 + 100/PUU-XX/2022 + 220/PUU-XX/2022 + 300/PUU-XX/2022 + 580/PUU-XX/2022	Ruang Sidang Pleno (Dedung 1)	<ul style="list-style-type: none"><li>Kepanitiaan</li><li>PUSTAK</li><li>Biro HAK</li><li>Biro HP</li><li>Biro Umum</li></ul> <a href="#">Laporan</a>
2.	Senin, 20 Juni 2022 09:00:00 WIB <b>Formulasi sudah diisi</b>	+ 64/PUU-XX/2022	Ruang Sidang Panel (Dedung 1)	<ul style="list-style-type: none"><li>Kepanitiaan</li><li>PUSTAK</li><li>Biro HAK</li><li>Biro HP</li><li>Biro Umum</li></ul> <a href="#">Laporan</a>



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifah Rahmawati  
NIP : 19831008 200901 2 001  
Jabatan : Pengelola Persidangan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 13 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Alifah Rahmawati



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk1796504372220113114505

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amriansyah Maulana  
NIP : 199010232015011001  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 07 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohana Citra Permatasari

Yang membuat pernyataan,



Amriansyah Maulana



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk1954834621220107114651

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andhyta Andam Nadia  
NIP : 19900820 201501 2 001  
Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022




Mengetahui,  
Atasan langsung,  
Yohanna Citra Permatasari



Yang membuat pernyataan,  
Andhyta Andam Nadia



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-719312183220106110632

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqmarina Rasika  
NIP : 19901210 201402 2 002  
Jabatan : Pengelola Persidangan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Aqmarina Rasika



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk1922098432220106034237

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ditya Zuliana  
NIP : 19911126 201402 2 001  
Jabatan : Pengelola Persidangan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 10 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Ditya Zuliana



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk1296952262220110101445

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Dodi Haryadi  
NIP : 198605042014021001  
Jabatan : Pengelola Persidangan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 07 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Achmad Dodi Haryadi



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-2107011415220107102526

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agusniwan Etra  
NIP : 198408082009121001  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan Pada Hakim Suhartoyo  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 13 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



( Yohana Citra Permatasari )


Yang membuat pernyataan,



(Agusniwan Etra)



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-228090763220113114906

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fenny Tri Purnamasari  
NIP : 199010032014022001  
Jabatan : Juru Panggil  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Fenny T. Purnamasari



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk1510095726220105013540

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ganggas Wibisono  
NIP : 199208072015011001  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohana Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Ganggas Wibisono



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR E 

Digital Signature

mk-66860657220105021906

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryo Gilang R  
NIP : 198605142010121002  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan Pada Wakil Ketua MK  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



( Yohana Citra Permatasari )


Yang membuat pernyataan,



( Suryo Gilang R )



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-938944972220112110726

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haifa Arief Lubis  
NIP : 198909032015012002  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 5 Januari 2022

Mengetahui,




Atasan langsung,  
Yohana Citra Permatasari



Yang membuat pernyataan,  
Haifa Arief Lubis



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-1104963189220105024708

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermita Uly Artha Sinurat  
NIP : 197401102006042003  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Hermita Uly Artha Sinurat



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-40426573220106040139

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Karmadaniah  
NIP : 19900619 201402 2 002  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Indah Karmadaniah



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-931985163220106033042

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairuddin  
NIP : 196805182012121001  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Khairuddin



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-519914527220106035900

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchtar Hadi Saputra  
NIP : 19890101 201402 1 001  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Adminitrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 10 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohana Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Muchtar Hadi Saputra



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-2023981412220110083002

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuzul Quráini Mardiya  
NIP : 198306292010122001  
Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohana Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Nuzul Quraini Mardiya



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk202658858220105014518

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riani Anggraini  
NIP : 198906162015012001  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan Pada Ketua MK  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



( Yohana Citra Permatasari )


Yang membuat pernyataan,



( Riani Anggraini )



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-1163966388220105021902

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Dewi Andryani  
NIP : 198208122006042002  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Manahan MP  
Sitompul  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022



Mengetahui,  
Atasan langsung,  
( Yohana Citra Permatasari )



Yang membuat pernyataan,  
( Rika Dewi Andryani )



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-982130952220106110820

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rio Tri Juli Putranto  
NIP : 197507262006041002  
Jabatan : Juru Panggil  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Rio Tri Juli Putranto



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-271612093220105015113

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita  
NIP : 198108102006042003  
Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Rita



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-746909599220105013709

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosalia Agustin Shella Hendrasmara  
NIP : 199008082015012001  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Rosalia Agustin Shella Hendrasmara



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk267702771220106024637

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Yosephin Sirait  
NIP : 198204202009 01 200 6  
Jabatan : Pengelola Persidangan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Siska Yosephin Sirait



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-650219871220105030643

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siswantana Putri Rachmatika  
NIP : 198407262010122001  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Siswantana Putri Rachmatika



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk788101397220106034225

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyanto  
NIP : 198107182006041002  
Jabatan : Pengelola Persidangan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 11 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohanna Citra Permatasari


Yang membuat pernyataan,



Supriyanto



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-1242420410220111090123

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsudin Noer  
NIP : 197712212009121001  
Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 5 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Yohana Citra Permatasari

Yang membuat pernyataan,



Syamsudin Noer



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk80189040220107020516

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohana Citra Permatasari  
NIP : 198205292006042004  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



Johan Yustisianto

Yang membuat pernyataan,



Yohana Citra Permatasari



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk60808873220105125519

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Nurwulantari  
NIP : 199006262015012001  
Jabatan : Pengolah Data Perkara dan Putusan pada Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Januari 2022

Mengetahui,  
Atasan langsung,



( Yohana Citra Permatasari )


Yang membuat pernyataan,



( Yunita Nurwulantari )



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-53446005220105013402

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

## DOKUMENTASI KEGIATAN UJI COBA DAN BIMBINGAN TEKNIS E-PERISALAH





